BAB III

DAKWAH RADIKALISME DI MEDIA *ONLINE* (KIBLAT.NET DAN VOA-ISLAM.COM)

A. Dakwah Radikalisme Di Media *Online* (Kiblat.net dan Voa-Islam.com)

1. Situs Kiblat.net dan Voa-Islam.com

a) Situs Web/*Website*

Situs web (bahasa inggris *website*) adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada *server* (sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentudalam sebuah jaringan komputer) yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perseorangan, kelompok atau organisasi.

Sebuah situs biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah *server* web yang dapat diakses melalui jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL. Gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di internet disebut pula sebagai *world wide web* atau lebih dikenal dengan singkatan WWW[1].

b) Kiblat.net

Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisipan yang didukung oleh para donatur dan muhsinin di antara kaum muslimin, tanpa mengikat.

[1]Wikipedia, "Situs Web", https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web (Jumat, 21 Juli 2017, 21.40).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kiblat.net bergerak dibidang dakwah Islam *online* dan menyediakan berita yang telah diverifikasi serta informasi keilmuan Islam yang telah melalui penelitian serta dianalisis agar bermanfaat bagi umat untuk menjawab isu-isu aktual. Kiblat.net optimis akan menjadi sumber informasi dan wawasan yang sangat diperlukan oleh kaum muslimin secara umum, dai, komunitas akademik, wartawan, dan pemikir Islam[2].

c) Voa-Islam.com

Voice of Al Islam[3]

VOA-Islam.com didirikan di Bekasi, Jawa Barat April 2009 dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Juni 2009.

Latar Belakang

Latar belakang pendirian tersebut atas dasar keprihatinan atas realita umat islam di Asia Tenggara (pada khususnya) yang makin termarjinalkan oleh kapitalis, dan gerakan zionis melalui labelisasi sebagai ekstrimis, konservatif dan fundamentalis terhadap perjuangan dan dakwah islam yang haq, sesuai dengan pemahaman generasi terbaik, salafus sholeh (Rasulullah, generasi Tabiin dan Tabiut Tabiin). Media ini berupaya menyuarakan kepentingan Islam dan umat Islam.

Dasar Pemikiran

An Nahl : 125, Surat 49 : 6, Ash Shaff 10-12.

---

[2]Kiblat Berita- Visi- Investigasi, "Tentang Kami", https://www.kiblat.net/info/tentang-kami/ (Kamis, 20 Juli 2017, 14.50).

[3]Voaislam 2009-2017, 8 Tahun Kobarkan Amar Maruf Nahi Munkar, "Redaksi", https://www.voa-islam.com/about (Kamis, 21 Juli 2017, 14.52).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

VISI

1. Menjadi media terpercaya yang mengedepankan kebenaran dan keadilan secara profesional.
2. Terwujudnya masyarakat muslim yang sadar akan kemuliaan dirinya dan peran serta tanggung jawab yang harus diembannya untuk terwujudnya sebuah peradaban yang bermartabat.

MISI

1. Mendakwahkan Al Haq di mana saja, kapan saja, melalui media apa saja.
2. Meningkatkan kualitas SDM dan kapabilitas teknologi Informasi dan komunikasi umat Islam.
3. Membangun dakwah *online* dan sebagai bentuk advokasi terhadap umat Islam Asia Tenggara.
4. Menjaga keutuhan dakwah, sunnah dan perjuangan umat Islam.
5. Menjadi media Islam *online* rujukan di Indonesia dan Asia Tenggara, Insyaallah.
6. Menyampaikan informasi berimbang tentang eksistensi dan permasalahan umat islam di Asia Tenggara khususnya dan dunia pada umumnya.

2. Isi Situs Kiblat.net

Berikut kami paparkan beberapa isi situs yang di *upload* oleh Kiblat.net:

a. Hizbut Tahrir dan Perkembangannya

1) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak diselenggarakannya Konferensi Internasional di Istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional maupun Nasional, serta dihadiri oleh tokoh-tokoh organisasi lain, Hizbut Tahrir resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka sejak tahun 2000. Hizbut Tahrir dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Para tokoh HTI banyak yang bertempat tinggal di Bogor dan upaya mereka dalam mensosialisasikan gerakannya mendapat sambutan positif dari kalangan *sivitas academica* IPB, sehingga salah satu pimpinan pusat HTI, Muhammad al-Khattah adalah alumni dan dosen IPB[4].

Untuk penanggung jawab kewilayahan nasional disebut Juru Bicara (Jubir) yang saat ini di Indonesia dipegang oleh Ismail Yusanto. Sedangkan Ketua Umum Nasional dipegang oleh Hafidz Abdul Rahman[5]. HTI dibangun atas dasar kemandirian yang memperoleh dana dari para simpatisan dan tidak menerima bantuan dari pemerintah bahkan secara tegas menolak dan mengharamkan penerimaan uang dari pemerintah. Untuk menjaga kemadirian dan independensi inilah maka setiap sumbangan yang diberikan kepada HTI harus melalui penelitian seksama.

Hizbut Tahrir maupun HTI sejak awal memang didesain sebagai organisasi politik. Tetapi berbeda dengan organisasi politik yang dikenal

---

[4]Dedy Slamet Riyadi, "Analisis Terhadap Konsep *Khilafah* Menurut Hizbut Tahrir" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008), 46.
[5] *Ibid.*, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama ini. HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol (partai politik) yang ikut dalam pemilu (pemilihan umum). HTI menerjemahkan partai politik dalam pengertian yang luas yaitu sebagai suatu organisasi yang aktivitasnya bertujuan mengoreksi kekuasaan dan membangunnya secara benar. Hal ini karena menurut HTI dalam situasi sekarang ini banyak partai Islam justru membingungkan umat Islam sendiri.

Oleh karena itu, HTI tidak mengikuti jejak partai-partai lain yang berdasarkan Islam untuk ikut andil dalam pemilu yang kemudian dapat menjadi anggota legislatif[6]. Sebagai bagian dari Hizbut Tahrir, HTI juga sangat menekankan pentingnya peran negara (*dawlah*) atau kekhalifahan sebagai sarana penerapan syari'at Islam. Syari'ah dalam pandangan kelompok ini harus ditopang oleh kekuatan negara. Oleh karena ini, kelompok ini mengusung ide perlunya mendirikan kembali *Khilafah Islamiyah* atau kekhalifahan Islam.

Kekhalifahan dalam Islam sendiri berakhir sejak tahun 1924 dengan lenyapnya Khalifah Usmaniyyah dan diganti oleh sistem Republik oleh Kemmal Atatturk, seorang nasionalis sekuler Turki. Sejak itu negara modern dengan batas-batas teritorialnya menjadi model yang digunakan oleh masyarakat muslim yang mendiami negara, meskipun mereka berstatus mayoritas mutlak seperti masyarakat muslim Indonesia. Baik Hizbut Tahrir maupun HTI sendiri memang mengakui bahwa tidak ada

[6]*Ibid.*, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teks al-Qur'an yang mewajibkan penganutnya mendirikan kekhalifahan, tetapi kewajiban itu diperoleh dalam perspektif kontekstual pesan al-Qur'an[7].

Menurut pandangan Hizbut Tahrir, kehidupan umat Islam sekarang ini berada dalam situasi yang tidak Islami, sebagai akibat dari berlakunya sistem sekuler yang dalam banyak hal memberikan andil besar bagi terciptanya kondisi sosial yang sangat buruk. Berbagai pelanggaran, baik pelanggaran hukum pidana maupun perdata, misalnya, telah dilakukan oleh banyak orang. Namun sistem yang ada masih belum bisa untuk melakukan penegakan hukum. Menurut HTI, Islam mempunyai sistem yang bisa membawa pada kebaikan. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan adalah mengganti sistem yang ada dengan sistem yang disediakan Islam.

Islam harus ditampilkan dan menjadi agama ideologis melalui *daulah Islamiyah* dengan *khalifah* sebagai penguasanya. *Khalifah* ini yang wajib melakukan dakwah dengan mengubah pemikiran atau melakukan pertarungan pemikiran (*ghazw al-fikr*), melaksanakan syari'at, memimpin jihad dan melindungi umat Islam. Dakwah merupakan satu-satunya untuk meraih keberhasilan mendirikan *khilafah* ini. Meski demikian, para aktivis HTI tidak menerima cara-cara kekerasan, misalnya mengangkat senjata dalam upaya mendirikan *khilafah* itu.

[7]*Ibid.*, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dakwah dilakukan sebagai proses penyadaran agar manusia mau mengikuti hukum Allah.

Dengan demikian, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukannya bukan sosial keagamaan. Namun demikian, sampai saat ini Hizbut Tahrir maupun HTI belum pernah mengikuti pemilu sebagaimana umumnya partai politik. Kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan Hizbut Tahrir lebih banyak melontarkan ide/wacana dan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintahan yang dipandang pro Barat.

2) Konstruksi *Khilafah* Menurut Hizbut Tahrir

a. Mengembalikan tegaknya *Khilafah*

Salah satu arus utama pemikiran dan langkah HT adalah upaya menegakkan *khilafah*. Hassan Ko Nakata, seorang guru besar fakultas teknologia Universitas Doshisha Jepang, pengagum dan pengikut Hizb al-Tahrir, menjelaskan bahwa tujuan utama dakwah islam di era globalisasi ini tidak lain adalah memberi pemahaman kepada masyarakat akan urgensi penyatuan dunia dengan tegaknya *khilafah* islam di atas muka bumi.

Dalam kitab *Nizam al-Islam* buku yang digunakan pengikut lanjutan pada bab *kayfiyyah haml al-da'wah al-islamiyyah*, dijelaskan dalam dakwah masa sekarang ini adalah dakwah untuk melanjutkan kehidupan islam dengan mengupayakan tegaknya *dawlah al-islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mampu menerapkan hukum islam, seperti yang dibuat dalam bagan yang dibuat oleh slah satu aktivis HTI[8].

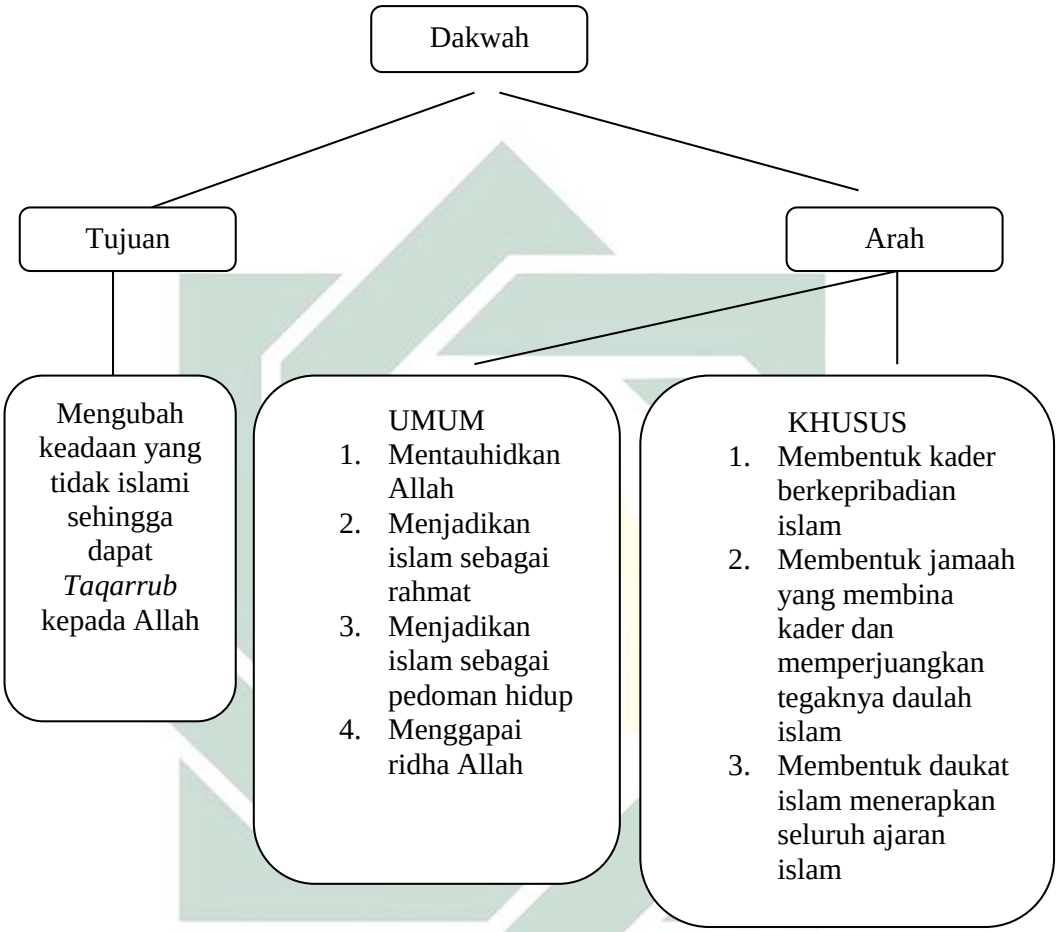

Gambar 2.

Tujuan dan Arah Dakwah

3) Ideologi Politik *Khilafah*

a. Kewajiban Menegakkan *Khilafah*

Hizb al-Tahrir melakukan berbagai upaya untuk memperoleh legitimasi atas konsep dan pemikiran *khilafah,* bagi mereka mendirikan *khilafah* merupakan suatu kewajiban seluruh umat islam.

[8]Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2012), 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam buku *al-Fikr al-Islami* terutama bab "*al-fardhu 'alal kifayati fardun 'ala kulli muslimin"* ditegaskan bahwa adalah suatu kesalahan fatal jika pemahaman tentang wajib *kifayah* itu diartikan sebagai gugurnya kewajiban bagi sebagian muslim karena sesuatu hal telah dilakukan oleh sebagian muslim lainnya-sekalipun kewajiban itu belum berhasil diwujudkan[9].

Pemahaman tentang wajib *kifayah* yang benar adalah jika sebagian orang telah benar-benar tuntas melakukan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi sebagian yang lain. Artinya, menegakkan *khilafah* Islam merupakan wajib *kifayah*. Selama *khilafah* belum berdiri maka setiap individu muslim yang mukallaf mempunyai kewajiban untuk menegakkannya tanpa pandang bulu hingga *khilafah* benar-benar berdiri. Bagi Hizb al-Tahrir, kewajiban menegakkan *khilafah* merupakan mahkota dari segala kewajiban yang dibebankan Allah kepada umat Islam.

Menurut mantan ketua umum DPD HTI, menegakkan *khilafah* merupakan kewajiban yang paling agung dalam agama. Sementara pihak-pihak yang tidak berniat menegakkannya maka mereka telah berdosa, bahkan sebagai perbuatan maksiat yang paling besar. "*bagi seorang muslim berdiam diri atau tidak turut serta berusaha mengangkat seorang khilafah merupakan suatu perbuatan yang*

[9]*Ibid.*, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diancam dengan dosa yang amat besar, karena dinilai mengabaikan salah satu kewajiban terpenting dalam Islam"[10].

b. Landasan Filosofis

Hizb al-Tahrir menolak disebut sebagai neo-Mu'tazilah, Khawarij, Wahabi dan lebih senang disebut *Islamiyyun (Islamist)*. Mereka menegaskan bahwa suatu pemikiran harus didasarkan pada nalar yang kuat, karena tanpa nalar yang kuat pemikiran menjadi rapuh. Asasnya adalah akal, akal menjadi satu-satunya asas, tempat dimana Islam didirikan. Akallah asas yang kita gunakan untuk memahami nash Islam. Karena itu, keimanan pada Islam bergantung pada akal[11].

Dalam kitab *Mafahim* dijelaskan bahwa dakwah wajib dilandaskan pada akal pemikiran sebagai *qiyadah fikriyyah* (kepemimpinan terhadap masyarakat yang melandaskan diri pada akal pemikiran). Pemikiran yang mampu membangkitkan umat adalah pemikiran yang tercerahkan. Pemikiran tercerahkan menurut HT, menempati tingkatan tertinggi dari tiga strata pemikiran. Dua lainnya adalah pemikiran yang mendalam dan yang dangkal.

c. Landasan Normatif

Kalau mengacu pada karya rujukan HT/HTI, landasan normatif yang benar-benar bisa disebut sebagai dalil *syari'at* hanya dalil yang

[10]*Ibid.*, 106-107.
[11]*Ibid.*, 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersumber pada Al-Qur'an, hadist, ijma' sahabat dan qiyas yang menggunakan '*illat syar'iyyah*[12].

1) Al-qur'an sebagai Landasan Normatif Pertama

   Hizb al-Tahrir yakin bahwa masalah *khilafah* dapat dirujuk pada Al-qur'an. Nu'man Hanief, salah seorang anggota HTI menyatakan, boleh jadi dunia islam sangat tidak setuju dengan metode bersenjata gerakan jihad HTI, namun soal legalitas *khilafah* di dalam Al-Qur'an tetap tidak terbantahkan.

2) Hadist sebagai Landasan Normatif Kedua

   Ada beberapa hadist yang dijadikan acuan sebagai kewajiban menegakkan *khilafah*, yaitu "*barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dengan tanpa hujjah, dan barang siapa yang mati dan tidak ada baiat di pundaknya, maka apabila mati, matinya seperti mati jahiliyyah".*

   Hizb al-Tahrir menafsirkan hadist diatas sebagai kewajiban melakukan baiat bagi umat Islam, serta mengkategorisasikan mereka yang tidak melakukan baiat seperti mati dalam keadaan jahiliyyah. Nalar yang dipakai adalah baiat tidak digunakan dan tidak diucapkan kepada seseorang, kecuali kepada *khalifah*.

[12]*Ibid.*, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, hadist diatas mewajibkan adanya baiat di pundak setiap muslim kepada *khalifah*[13].

3) Ijma' Sahabat sebagai Landasan Normatif Ketiga

Hizb al-Tahrir juga menekankan kewajiban adanya *khilafah* pada dalil ijma' sahabat. Sahabat telah sepakat tentang wajibnya *khilafah* dengan dibuktikan dengan baiat mereka terhadap Abu Bakar, Umar dan Ustman.

Untuk membuktikan kewajiban *khilafah* atas dasar ijma' sahabat, HT menunjukkan bukti suatu peristiwa setelah Nabi wafat. Pada saat Nabi wafat, para sahabat tidak segera menguburkan Nabi, tetapi mendahulukan kepentingan suksesi politik yaitu mencari pengganti Nabi sebagai *khalifah.* Juru bicara HT di Inggris, Farid Kasim menyebutnya "lebih penting daripad memakamkan manusia besar/Muhammad[14].

Menurut mereka masyarakat Islam tidak boleh kososng dari *khalifah* lebih dari tiga hari sehingga menentukan pengganti Nabi lebih penting ketimbang mendahulukan pemakaman Nabi.

d. Landasan Historis (Sejarah)

Hizb al-Tahrir menegaskan bahwa sejarah tidak dapat dijadikan sebagai sumber peraturan dalam Islam (*al-nizam al-Islami*), baik dari segi pengetahuan suatu peraturan Islam maupun dari segi pengambilan dalil. Demikian juga sejarah tidak bisa digunakan sebagai acuan dan

[13]*Ibid.*, 125.
[14]*Ibid.*, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asas untuk kebangkitan umat dan asas suatu tujuan. Namun di sisi lain HT menyatakan bahwa *khilafah* bukan sekedar ide atau angan-angan saja, melainkan pernah ada di dunia[15].

HT mengklaim bahwa masa Nabi hingga Turki Ottoman merupakan periode *khilafah,* sedangkan *khilafah* adalah suatu teori negara yang sesuai dengan Islam. Sementara itu, penerapan Islam secara sempurna, telah dimulai sejak Nabi hingga tahun 1918 M sebelum penjajah menguasai negeri-negeri muslim.

4) Karakteristik Sistem *Khilafah* dan Perbedaannya dengan Sistem Lain

Menurut Hizbut Tahrir, Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem *khilafah*. Sistem *khilafah* ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam. Sistem *khilafah* berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti disebutkan dalam kitab *Nidham al-Hukm fi al-Islam,* yang merupakan rujukan utama Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan politiknya, bahwa "...*Sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem khilafah ... Sistem khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia…*"[16].

Khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara'. Sistem

[15]*Ibid.,* 138.
[16]Dedy Slamet Riyadi, "Analisis Terhadap Konsep....*op cit.,* 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khilafah sangat berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain, baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat maupun dari aspek undang-undang dasar yang diberlakukannya ataupun dari aspek bentuk yang mengambarkan wujud negara. Seperti bentuk pemerintahan *monarchi*, republik, kekaisaran ataupun federasi.

Sistem *monarchi* pemerintahannya menerapkan sistem waris (putra mahkota), di mana singgasana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota, dari orang tuanya, maka pemerintahan Islam tidak mengenal *waliyat al-nahd* (putra mahkota). Sedangkan Islam telah menentukan cara memperoleh pemerintahan dengan *bai'at* dari umat kepada *khalifah* atau imam dengan kebebasan memilih misalnya melalui pemilu (pemilihan umum). Sistem *monarkhi* telah memberikan hak tertentu serta hak-hak istimewa kepada raja yang tidak dimiliki oleh yang lain sehingga secara pribadi telah menjadikan raja memiliki kekebalan hukum. Sedang sistem *khilafah* tidak pernah memberikan kekhususan kepada *khalifah* dalam bentuk hak-hak istimewa melainkan hak yang dimiliki *khalifah* sama dengan hak rakyat biasa[17].

Begitu juga dengan sistem republik, sistem republik berdiri diatas sistem demokrasi yang kedaulatannya berada ditangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki hak untuk memerintah serta membuat aturan berupa

[17]Dedy Slamet Riyadi, "Analisis Terhadap Konsep....*op cit.*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang termasuk berhak menghapus dan menggantinya, menentukan seseorang untuk menjadi penguasa sekaligus berhak untuk memberhentikannya. Sedangkan sistem *khilafah* berdiri diatas pilar akidah islam serta hukum-hukum *syara'*, dimana kedaulatan ada ditangan *syara'* bukan ditangan umat[18].

Pada dasarnya jabatan pemerintahan dalam sistem republik selalu dibatasi dengan masa jabatan tertentu, yang tidak mungkin bisa melebihi dari masa jabatan tersebut. Sedangkan dalam sistem *khilafah*, tidak terdapat masa jabatan tertentu. Batasannya adalah apakah *khalifah* masih menerapkan hukum *syara'* atau tidak. Selama *khalifah* masih melaksanakan hukum *syara'* maka dia tetap menjadi *khalifah*. Meskipun masa jabatannya amat panjang atau bahkan baru satu hari, apabila telah meninggalkan hukum *syara'* maka berakhirlah masa jabatannya atau harus diberhentikan[19].

Sistem *kekhalifahan* juga berbeda dengan sistem kekaisaran. Sistem kekaisaran tidak menganggap sama antara ras satu dengan yang lain. Pemberlakuan hukum memberikan keistimewaan di wilayah pusat begitu juga dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi. Sedangkan dalam pemerintahan *khilafah* menerapkan sama antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain baik dalam pemberlakuan hukum maupun lainnya.

---

[18]Dedy Slamet Riyadi, "Analisis Terhadap Konsep....*op cit.*, 51.
[19]*Ibid.*, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terakhir sistem federasi membagi wilayah-wilayahnya dalam otonominya sendiri-sendiri dan bersatu dalam pemerintahan secara umum. Sistem *khalifah* menerapkan satu kesatuan yang mencakup seluruh negeri. Harta kekayaan seluruh wilayah negara Islam dianggap satu, begitu pula anggaran belanja akan diberikan secara sama untuk kepentingan seluruh rakyat tanpa melihat daerahnya[20]. Dapat disimpulkan bahwa sistem *khilafah* adalah sistem yang berbeda dengan sistem pemerintahan yang sudah ada pada saat ini, hal ini bisa dilihat dari landasan sistem maupun isinya meskipun dimungkinkan dalam prakteknya akan ada kemiripan yang hampir sama.

b. Hizbut Tahrir Indonesia dalam Rubrik Berita (*News*) Kiblat.net

HTI: Perppu Hanya Akal-akalan untuk Bubarkan Ormas[21]

"Pemerintah boleh menuduh, akan tetapi kalau pembubaran tanpa pengadilan itu bentuk lahirnya otoritarianisme,".
"Hal ini berlaku sejak surat diterbitkan bukan sejak diterima. Ismail menuturkan mungkin saja minggu depan Hizbut Tahrir bubar. Karena bisa saja surat peringatan saat ini sudah diterbitkan".

"Perppu tentang keormasan hanya cara pemerintah agar mudah membubarkan ormas".
"Ia menolak terhadap perppu ormas tersebut".

c. Isi Situs Kiblat.net dalam Rubrik Berita (*News*)

Editorial: Menyerta Ulama Usai Pilkada[22]

---

[20]Dedy Slamet Riyadi, "Analisis Terhadap Konsep....*op cit.*, 53.
[21]Kiblat Berita-Visi-Investigasi, "HTI: Perppu Hanya Akal-akalan untuk Bubarkan Ormas", https://www.kiblat.net/info/tentang-kami/ (Kamis, 20 Juli 2017, 14.32).
[22]Kiblat Berita-Visi-Investigasi, "Editorial: Menyerta Ulama Usai Pilkada", https://www.kiblat.net/2017/04/18/menyerta-ulama-usai-pilkada/ (Jumat, 28 Juli 2017, 14.38).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Urat syarat kita makin terbetot demi mengetahui Pemerintah dengan telanjang memperlihatkan sikap tidak netral. Pemerintah memang tidak secara lugas menyatakan dukungan kepada Ahok. Tetapi sikap berlebihan kepada kubu kontra-Ahok sudah menyiratkan ketidaknetralan tersebut.

Lihat saja misalnya kesigapan aparat keamanan mengkriminalkan tokoh-tokoh GNPF-MUI. Namun ompong dan tak berdaya sekadar untuk menahan Ahok yang sudah jadi tersangka. Alih-alih memenjarakan, sekadar membacakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pun harus ditunda setelah Pilkada. Belum lagi berderet kasus pelanggaran yang dilakukan kelompok pro-Ahok namun tak kunjung jelas penanganannya.

Inilah barangkali yang membuat darah umat Islam naik ke ubun-ubun. Sehingga, hari ini seluruh umat Islam Indonesia kompak untuk mengusung Gubernur Muslim untuk menggantikan Ahok. Sulit menemukan momentum seperti ini, di mana hampir semua lapisan umat dapat bersatu dalam satu barisan yang padu".

...Namun bila takdir Allah menghendaki Ahok tetap berkuasa, kita pun tak perlu kehilangan kontrol dan lepas kendali. Mungkin Allah ingin menunjukkan kepada kita sebuah keputusan yang selama ini masih menjadi berdebatan di antara kita tentang layak tidaknya Demokrasi sebagai sarana membela dan memperjuangkan Islam.

Kita pun harus mawas diri dan kembali kepada bandul sejarah para pendahulu, di mana kemenangan tidak Allah berikan kecuali kepada umat yang telah lolos menjalani tarbiyah yang panjang serta berbagai macam tempaan berat maupun saringan (tamhish) yang ketat".

"Namun melihat kehadiran negara yang berat sebelah, kumpulan survei dan perang opini saja belum menjadi jaminan terwujudnya keinginan menjegal Ahok. Pilkada adalah salah satu instrumen Demokrasi, di mana di dalamnya kecurangan dan keculasan—dan akhirnya kediktatoran—menjadi hal yang lumrah dan halal. Maka, berbagai usaha menghadirkan Gubernur Muslim, juga harus dibarengi dengan kesiapan dan rencana bila Ahok ternyata dimenangkan sebagai penguasa selanjutnya".

"Apapun dari dua kondisi yang akan terjadi besok, Ulama tetap menjadi peran penentu langkah umat Islam berikutnya. Mereka-lah yang bertanggungjawab untuk terus menyeru dan membimbing umat agar konsisten dalam jalan panjang memberangus kezaliman dan memenangkan Islam".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. MUI: Ajaran Syiah Penuhi 10 Kriteria Aliran Sesat dalam Kiblat Buletin Islam Edisi 05, Muharram 1435[23]

"...Dalam buku setebal 152 halam itu, MUI juga menyebutkan pernyataan para ulama besar Indonesia yang menegaskan bahwa Syiah adalah ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni, yang sesuai dengan ajaran Salafus Shaleh. Ulama-ulama tersebut adalah Syaikh Hasyim Al Asy'ari (Rais Akbar NU), Prof. DR. Hamka (Tokoh Muhammadiyah dan Ketum MUI periode 1975-1980), DR. Muhammad Nashir (Pendiri Dewan Dakwah (DDI) dan KH. Hasan Bashir (Ketua MUI periode 1985-1998)".

e. Berita Tentang Jihad dalam Kiblat.net: Dukung Aksi Simpatik 55, Din Syamsuddin: Semoga Jihad Bagi Kita

Dukung Aksi Simpatik 55, Din Syamsuddin: Semoga Jihad Bagi Kita[24]

"GNPF-MUI akan menggelar Aksi Simpatik 55 pada Jumat, 5 Mei 2017. Aksi damai itu dimaksudkan untuk mendukung hakim yang menangani kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok bersikap independen.

Ustadz Bachtiar Nasir juga mengatakan bahwa Aksi Simpatik 55 lusa bukan untuk menekan pihak hakim. Namun, untuk menunjukkan ketidakadilan yang dirasakan umat Islam.

"Kami datang untuk menunjukkan inilah rasa ketidakadilan yang kami rasakan itu dan ini tentu tidak kami buat buat," tegasnya.

UBN menjelaskan bahwa aksi tersebut akan dimulai dengan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Lalu dilanjutkan dengan long march menuju Gedung Mahkamah Agung (MA) dan disampung dengan penyampaian orasi dan pertemuan delegasi".

f. Berita Tentang Jihad: Ikuti Aksi Simpatik 55, Siswa SMP: Kami Jihad Fisabilillah

Ikuti Aksi Simpatik 55, Siswa SMP: Kami Jihad Fisabilillah[25]

---

[23]Kiblat Berita-Visi-Investigasi, "MUI: Ajaram Syiah Penuhi 10 Kriteria Aliran Sesat", https://www.kiblat.net/2013/11/15/mui-ajaran-syiah-penuhi-10-kriteria-aliran-sesat-yang-ditetapkan-mui/ (Kamis, 27 Juli 2017, 13.21).

[24]Kiblat Berita-Visi-Investigasi, "Dukung Aksi Simpatik 55, Din Syamsuddin: Semoga Jihad Bagi Kita", https://www.kiblat.net/2017/05/02/dukung-aksi-simpatik-55-din-syamsudin-semoga-jihad-bagi-kita/ (Rabu, 02 Agustus, 2017, 14.22).

[25]Kiblat Berita-Visi-Investigasi , Ikuti Aksi Simpatik 55, Siswa SMP: Kami Jihad Fisabilillah", https://www.kiblat.net/2017/05/05/ikuti-aksi-simpatik-55-siswa-smp-kami-jihad-fisabilillah/ (Rabu, 02 Agustus 2017, 14.34).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Saat ditanya motivasi, bocah kelas dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjawab ikut aksi simpatik untuk menuntut Ahok dipenjara atas penodaan agama. Bahkan, ia menyebut Ahok kurang akal karena menista agama...

...Selain itu, ia juga menekankan kepada penegak hukum untuk tegas kepada Ahok. Menurutnya, Ahok harus dihukum seperti penista agama pada masa lalu.

"Dulu-dulu penista agama dipenjara lima tahun. Kita juga minta yang setimpal. Jangan dibeda-bedain," tegasnya. Lebih jauh, Zafran mengatakan bahwa kedua orang tuanya mendukung dengan aksi yang ia dan kawan-kawannya ikuti."

3. Isu Situs Voa-Islam.com

Berikut kami paparkan beberapa isi situs yang di*upload* oleh Voa-Islam.com:

a) Hizbut Tahrir Indonesia dalam Rubrik Berita Politik Indonesia Voa-Islam.com

Diduga Anti Pancasila, HTI Tantang Penuduh (Pemerintah) Bersuara[26]

"HTI meminta bukti kepada penuduh (pemerintah) yang mengatakan bahwa ormas ini anti pancasila".
"Ismail sebelumnya menyebutkan bahwa perppu No. 2 tahun 2017 yang baru dikeluarkan oleh Pemerintahan Joko Widodo dianggap cacat. Cacat secara procedural dan cacat secara substansi. Ismail pun menyatakan penolakannya dan tegas menolaknya".

"Dalam UU ormas yang lama sudah disebutkan bahwa yang bertentangan dengan Pancasila itu adalah ateisme, lenimisme, kominisme dan marxisme".
"HTI adalah kelompok dakwah Islam yang menyampaikan ajaran Islam dari A sampai Z, dari nama apapun, *akidah*, *syariah*, *syaksiah* dan *khilafah*, itu adalah ajaran Islam".
"HTI merasa ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila".

[26]VoaIslam 2009-2017, 8 Tahun Kobarkan Amar Maruf Nahi Munkar, "Diduga Anti Pancasila, HTI Tantang Penuduh (Pemerintah) Bersuara", https://www.voa-islam.com/read/politik-indonesia/2017/07/17/52038/diduga-anti-pancasila-hti-tantang-penuduh-pemerintah-bersuara/ (Kamis, 20 Juli 2017, 14.35).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Islam pun tidak pernah disebutkan sebagai anti Pancasila".
"Karena itu kami tidak pernah ada masalah".
"Adanya unsur penting yang ingin bisa ditegakkan melalui media keadilan justru dihilangkan oleh pemerintah yaitu pengadilan".

"Secara substansial, Perppu ini bisa membawa negara kita ke era diktatorism".

b) Isu Situs Voa-Islam.com dalam Rubrik Berita Dakwah Indonesia

"Jamiyyah Persatuan Islam setuju dengan sikap bahwa Ormas yang bertentangan dengan NKRI ataupun Pancasila itu harus dibubarkan. Namun hal itu tidak lantas ditafsirkan sekehendak pemerintah hanya untuk membubarkan Ormas tertentu. Apalagi, tanpa adanya suatu bukti bahwa Ormas tertentu itu bertentangan dengan Pancasila".

c) Berita Dakwah Indonesia Tentang Jihad dalam Voa-Islam.com: Aksi Bela Islam Juga Digelar di Tasikmalaya dengan Ribuan Massa

"Dengan tuntutan senada, mereka mendesak pemerintah untuk segera mengadili Ahok. "Kalau si Ahok tidak segera ditangkap, rakyat tidak akan percaya pada hukum. Jangan salahkan jika rakyat bergerak dengan caranya sendiri. Itu karena pemerintah pilih kasih dalam menegakkan hukum," kata pimpinan Ponpes Miftahul Huda Jarnauziyah, Ustadz Muhammad A. Yan-yan.

Sementara itu koordinator aksi, KH Aminudin Bustomi, menegaskan jika pemerintah tidak mengindahkan seruan MUI Pusat maka umat Islam akan mengadakan aksi lanjutan pada tanggal 4 November di Jakarta".

4. Isu Situs Moslemforall.com

Berikut kami paparkan sebuah artikel yang di*upload* oleh Moslemforall.com sebagai isi situs kontra dari situs Kiblat.net dan Voa-Islam.com:

Belajar dari sikap diam PBNU dalam kasus Ahok[27]

[27]Nahdhatul Ulama, "Belajar dari sikap diam PBNU dalam kasus Ahok", http://www.moslemforall.com/belajar-dari-sikap-diam-pbnu-dalam-kasus-ahok/ (Kamis, 03 Agustus 2017, 13.04).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Berikut adalah salah satu ayat yang menjelaskan sikap yang harus dikedepankan oleh muslim jika ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dinistakan oleh orang lain. Termaktub dalam Qs, al-An'am ayat 68-70.

68. "Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)."

69. "Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikitpun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka; akan tetapi (kewajiban mereka ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa."

70. "Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafa'at[487] selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu."

...Pilihan NU merupakan pilihan yang memiliki landasan kuat dan sesuai dengan anjuran al-Quran. Ditambah tingkat kerumitan kasus ini yang menimbulkan banyak spekulasi media dalam memberikan konfirmasi atas kasus ini. Sehingga implikasi politik DKI yang memanas dengan mudah menyulutkan lidahnya ke daerah-daerah lain yang sebenarnya tidak penting untuk turut nimbrung. Dari sikap diam -yang tidak senantiasa bermakna apatis inilah PBNU ingin mengajak kepada warga Nahdliyyin khususnya dan warga muslim di Indonesia secara keseluruhan agar melimpahkan masalah ini ke badan yang berwajib yang berhak menghakimi sang Gubernur Petahana".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id